

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

KABUPATEN: -----

(1)	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ----- Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah ¹ seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ----- Unit. %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : --- ---Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP Hr	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Rp./ Tidak dipungut	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparatur Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2015 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2015, sebanyak = ----- orang - Penduduk pada akhir tahun 2015, berjumlah = ----- orang	... per 10.000 penduduk	Sumber data dari BKD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada/tidak ada	Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---- --Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak ada	Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2015,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal --- --- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2016.	Tepat / tidak	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja		10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2015, disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- 2016	Tepat/tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan	
		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian Laporan Kinerja sesuai jadwal yg telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja tahun 2015. disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal ----- 2016	Tepat/tidak	Normalisasi	
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak ----- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan ----- 2) Urusan ----- 3) Urusan ----- 4) Urusan ----- 5) Urusan ----- 6) Urusan ----- Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2015, sebanyak 6 urusan.	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2015	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2015, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 3) Dst--- MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> ²	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ----- prioritas. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program/agenda prioritas- %	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan
		Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2015 (APBD) = ----- urusan. %	Sumber data : sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2015.
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2015	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2015	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD 2015. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2014).	Tepat/ tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----- 4) Urusan PU Rp. ----- %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi belanja per-urusan(saat			

² Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
						5) Urusan Sosial Rp. ----- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ----- 7) Urusan Koperasi Rp. ----- 8) Urusan Satpol PP Rp. ----- 9) <u>Urusan Kependudukan & Capil Rp. -----</u> Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----- Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. -----		evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
			19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan Rp. -----</u> Total Belanja Pend & Kes Rp. ----- %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan - SKPD lain yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ³ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ----- Tahun ----- tentang ----- (standar pelayanan publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum
		Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS kabupaten tahun 2015 sebanyak ----- orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2015 sebanyak ----- orang-	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
			22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD

³ Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kelembagaan	23	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ---- unit 7) Kecamatan/Distrik = ---- unit Jumlah SKPD = ---- unit	----- unit	Sumber data dari Bagian Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2015, sebanyak ----- Perda (Daftar terlampir)	... PERDA	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2015	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, sebanyak ----- RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, sebanyak ----- PERDA.	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2015 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2015, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2015, sebanyak----- keputusan.	... %	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti keputusan Bupati	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2015 x 100%	- Keputusan Bupati tahun 2015, sebanyak -- ---- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2015 yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. %	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjuti Peraturan Bupati	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Kabupaten dalam tahun 2015 x 100%	- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Perbup. - Peraturan Bupati dalam tahun 2015, sebanyak ----- Perbup. %	Sumber data dari Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2015 tentang - ---- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2015 tentang - ---- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- %	Sumber data dari Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Medianya :----- - Sebutkan Perbup nomor ----- tahun ----- tentang -----.	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 sebesar Rp. ----- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2015 sebesar Rp. - ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2015, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD	34	<u>Belanja Langsung</u> terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp----- - Total Belanja APBD Tahun 2015, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: -----	Opini tahun 2015 = ----- Opini tahun 2016= -----	Opini: 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i>); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i>); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>). Opini LHP Tahun 2015, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2015, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2015, sebesar Rp -- ----- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. ----- %	Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015, sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak ----- temuan. %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2015 terhadap <u>potensi PAD</u> ⁴	Jumlah realisasi PAD 2015 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2015 APBD %	Sumber data dari BPKAD , angka pembagi menggunakan potensi PAD dalam target tahunan dalam RPJMD

⁴ Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2015 - PAD 2014) : PAD 2014 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp.---- %	Sumber data dari BPKAD
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015	Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari 1) -----, 2) -----, 3) -----, 4) Dst -----. Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP. Data berupa proses E-procurement
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2015	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2015, sebanyak ----- ijin	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP